

## FILM DOKUMENTER UNTUK PEMBANGUNAN INDONESIA

Ade Suryani  
Universiti Kebangsaan Malaysia  
43600 Bangi, Selangor  
adesuryani@gmail.com

### Abstrak

Film atau gambar bergerak dianggap sebagai media komunikasi yang paling utama, bahkan disebut-sebut sebagai bidang seni yang terdepan sejak penemuannya di akhir abad ke-19 lalu. Terlebih lagi jenis film dokumenter. Dengan paparan fakta, film jenis ini mampu memberikan kesan yang kuat dan mendalam bagi penontonnya. Bukan hanya berfungsi untuk menginformasi dan menghibur, tapi lebih jauh film dokumenter juga turut memainkan peranan dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kajian ini dilakukan untuk melihat sejarah dan perkembangan industri film dokumenter di Indonesia. Rentang masa yang dipilih adalah sejak awal masuknya film dokumenter ke Indonesia sehingga tahun dilakukannya kajian ini (1900-2008). Rentang masa ini dibagi dalam 4 tahap, yaitu: tahap awal kemasukan hingga masa kemerdekaan Indonesia (1900-1945), tahap pemerintahan Orde Lama (1945-1965), tahap pemerintahan Orde Baru (1966-1997), dan tahap selepas era reformasi (1998-2008). Walau bagaimanapun kertas kerja ini hanya meliputi analisis fungsi film dokumenter sebagai agen pembangunan. Data dikumpulkan dengan metode pen-sejarahan dan wawancara mendalam, lalu dianalisis dengan metode analisis kandungan kualitatif. Salah satu hasil kajian utama ini adalah film dokumenter telah digunakan dengan meluas sebagai alat pembangunan masyarakat dan ekonomi sejak zaman penjajah dan diteruskan sehingga diperingkat awal zaman selepas kemerdekaan. Walaupun film dokumenter mempunyai potensi untuk digunakan sebagai alat pembangunan, media ini tidak diberi perhatian dari segi pembangunan sistem dan kasusnya. Perkembangannya juga masih harus berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti masalah regulasi dan kontrol, manajemen produksi, pasaran, peningkatan kualitas, serta perbaikan sistem pengelolaan perfilman nasional. Sekiranya sistem media film ini tidak ditentukan dari segi keutamaan fungsi dan kepentingannya, film dokumenter sebagai media, dapat dengan mudah digunakan oleh pihak-pihak berkepentingan untuk memenuhi hasrat yang mungkin tidak menguntungkan masyarakat. Pada bagian akhir, kajian ini juga membandingkan perkembangan film dokumenter antara Indonesia dengan Malaysia sebagai dua negara membangun yang mempunyai kesamaan latar belakang dan sejarah pembangunan.

**Kata Kunci:** Film Dokumenter, Pembangunan, Regulasi dan Sistem Media Film

### Pendahuluan

Film dokumenter atau yang kerap disebut sebagai film non-fiksi adalah film yang memaparkan fakta yang wujud dalam kehidupan manusia, biasanya mengenai sejarah, laporan perjalanan, atau sebatas merekam suatu peristiwa yang terjadi di dalam suatu lingkungan atau kejadian peristiwa. Pada tahun 1948 dalam musyawarah yang diselenggarakan di Czechoslovakia, *World Union of Documentary*, yang merupakan gabungan dari pembuat film,

pengguna film serta organisasi perfilman dari 14 negara, memberikan definisi film dokumenter sebagai; “..all methods of recording on celluloid any aspect of reality interpreted either by factual shooting or by sincere and justifiable reconstruction, so as to appeal either to reason or emotion, for the purpose of stimulating the desire for, and the widening of, human knowledge and understanding, and if truthfully posing problems and their solutions in the spheres of economic, culture and human relation. (Rotha, 1951)

Film dokumenter juga sering dikaitkan dengan aktualitas. Ini diambil berdasarkan akar bahasanya, yaitu bahasa Perancis, *actualités* yang bermakna peristiwa terkini, atau sesuatu yang terjadi dalam kurun masa yang relatif baru. Beberapa jenis film yang dapat dikategorikan dalam film jenis ini antaranya film kisah perjalanan (*travelogues*), film industri, film ilmu pengetahuan, film olahraga, film berita dan sebagainya, yang dibuat atas dasar aktualitas dan kenyataan. (Kessler, 2005)

Pada awal sejarah munculnya film dokumenter buatan Louis Lumière pada tahun 1895, tidak ada sesuatu pertanda yang menyebutkan bahwa orang-orang yang terlibat dalam penemuannya itu telah mempunyai konsep betapa pentingnya film sebagai suatu bentuk penceritaan yang mampu menghibur, memesonakan dan mempengaruhi jutaan orang di seluruh dunia (Fang 1997). Nyatanya kemudian film telah menjadi aspek penting dalam masyarakat, bukan hanya berperan sebagai penghibur, tetapi juga berfungsi sebagai penyampai informasi, media propaganda, media pendidikan, bahkan menjadi pendukung industri dan ekonomi di suatu negara.

Pada tahap perkembangannya, film dokumenter banyak mengambil peranan dalam perang, propaganda, dan pembangunan. Film, yang awal abad ke-20 merupakan sesuatu yang baru, mampu menarik perhatian orang ramai untuk menontonnya. Oleh karena itu, film dipandang sebagai media yang efektif sebagai saluran ekspresi, pembujukan (persuasi), pendidikan, serta untuk menyampaikan pesan-pesan khususnya sebagai alat propaganda oleh pihak-pihak yang berkuasa.

Pratzner (1947) pernah menuliskan bahwa tidak ada hal yang wujud di kehidupan sosial, ekonomi, industri atau bahkan politik modern kita ini yang tidak dapat direkam melalui film. Apalagi di abad ke-21 ini, di mana teknologi perekam gambar telah berkembang begitu pesatnya, sehingga memungkinkan tiap-tiap orang merekam kejadian yang dijumpai dan membuat film dokumenternya sendiri. Tambahan pula, wujudnya era digitalisasi dan globalisasi semakin memudahkan pembuatan dan penyebaran film dokumenter ke berbagai penjuru dunia. Oleh sebab itu, pengaruh yang ditimbulkan film dokumenter bukan lagi terbatas pada satu kawasan

atau satu negara saja, tetapi juga mencakup masyarakat global.

## Media Massa dan Pembangunan

Untuk menjelaskan pembangunan suatu media di sebuah negara membangun, serta bagaimana sesebuah media digunakan bagi mendukung pembangunan di negara tersebut, kajian ini menggunakan Teori Media Pembangunan sebagai landasan perspektif. Berdasarkan Teori Media Pembangunan, negara membangun dicirikan sebagai negara yang masih lagi memiliki kekurangan dalam aspek infrastruktur komunikasi, tenaga profesional, sumber-sumber produksi dan budaya, serta ketersediaan khalayak. Negara dalam kategori ini juga masih lemah dalam bidang teknologi dan kepakaran komunikasi, serta masih terlalu berfokus dalam upaya pembangunan identitas dan ketahanan nasional. Dalam sistem ini, media berada di bawah kontrol pemerintah, namun kontrol itu tidak bersifat mutlak. Media dalam sistem ini difungsikan sebagai medium yang mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah serta melancarkan program pembangunan yang dijalankan oleh negara. Media dalam sistem ini pula banyak memainkan peranan sebagai alat pendidikan dan penyampai informasi.

Ciri-ciri seterusnya dari sistem ini adalah media massa harus menerima dan mengemban tanggungjawab pembangunan positif seiring dengan kebijakan pembangunan nasional, serta memberi keutamaan pada aspek bahasa dan kebudayaan nasional pada kandungannya. Kebebasan media harus terbuka terhadap larangan mengikut kepentingan ekonomi dan keperluan pembangunan sosial. Media massa juga harus memberi keutamaan pada informasi pembangunan di negara membangun lainnya yang mempunyai kedekatan secara geografis, budaya maupun politik. Wartawan atau pekerja media lainnya mempunyai tanggungjawab yang sesuai dengan kebebasan pencarian informasi dan pendelegasian tugas. Selain itu, dengan bertujuan pada pembangunan, negara juga berhak turut campur atau melarang dalam hal pengoperasian media, sensor, sponsorship, atau bahkan melakukan pengawasan secara langsung (Mc.Quail 1987)

Teori ini menjadi kian penting sejak dekade 1960-an, ketika agensi-agensi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) seperti UNESCO telah

memberi banyak perhatian terhadap sumbangan media massa pada pembangunan sebuah negara. Berdasarkan kajian yang dikendalikan UNESCO dan beberapa pakar komunikasi Amerika pada masa itu seperti Pye (1963), Schramm (1964), Lerner (1974), dan ramai lagi, didapati bahwa memang ada hubungan antara pencapaian ekonomi sebuah negara dengan perkembangan media massa di negara berkenaan. Bagaimanapun, masih dirumuskan bahwa media massa memang banyak menyumbang terhadap percepatan proses pembangunan (Mohd Hamdan Adnan & Zulkarimein Nasution 1992).

Dalam kajian Schramm (1964) yang tergolong sebagai klasik, dirumuskan juga tugas utama komunikasi dalam suatu perubahan sosial dalam rangka pembangunan nasional, yaitu:

1. Menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan nasional agar mereka memusatkan perhatian kepada kebutuhan akan perubahan, kesempatan cara mengadakan perubahan, sarana perubahan dan membangkitkan aspirasi nasional.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ambil bagian secara cergas dalam proses pembuatan keputusan, memperluas dialog agar melibatkan semua pihak yang akan membuat keputusan tentang perubahan, memberikan kesempatan kepada para pemimpin masyarakat untuk memimpin dan mendengarkan pendapat masyarakat awam, dan menciptakan arus informasi yang berjalan lancar dari bawah ke atas.
3. Mendidik tenaga kerja yang diperlukan untuk pembangunan dari orang dewasa hingga anak-anak, sejak pelajaran baca tulis hingga keterampilan teknik yang mengubah hidup masyarakat.

Media massa juga, masih menurut Schramm (1964), secara sendirian ataupun bersama-sama institusi lain dapat melakukan beberapa peranan sebagai pemberi informasi, sebagai pembuat keputusan, dan sebagai pendidik. Masih dalam hubungannya dengan bagaimana media massa mendukung perkembangan dan pembangunan di sebuah negara, kajian ini juga mengidentifikasi bagaimana media seperti film dikembangkan dan dibangunkan pada sebuah negara membangun seperti Indonesia.

## **Metode Penelitian**

Kajian ini menelusuri sejarah dan perkembangan film dokumenter Indonesia, sejak awal kemasukan filem sebagai media ke Indonesia, iaitu sejak tahun 1900 sehingga ke tahun 2008. Rentang masa yang dipilih adalah sejak awal masuknya film dokumenter ke Indonesia sehingga tahun dilakukannya kajian ini (1900-2008). Rentang masa ini dibagi dalam 4 tahap, yaitu: tahap awal kemasukan hingga masa kemerdekaan Indonesia (1900-1945), tahap pemerintahan Orde Lama (1945-1965), tahap pemerintahan Orde Baru (1966-1997), dan tahap selepas era reformasi (1998-2008).

Metode yang paling tepat digunakan untuk kajian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan kaedah kajian sejarah (historiografi) serta wawancara mendalam dengan beberapa tokoh yang mencermati sejarah dan perkembangan filem di Indonesia. Kajian ini juga menggunakan metode analisis kandungan kualitatif untuk menganalisis beberapa film dokumenter terpilih dari masing-masing tahap.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Film Dokumenter dan Pembangunan di Indonesia**

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kajian ini mendapati bahwa film dokumenter mempunyai peranan penting yang secara langsung maupun tidak langsung, berhubungan dengan perkembangan sistem politik dan pembangunan di Indonesia pada sejak awal kemasukannya hingga masa sekarang ini.

Awal masuknya film dokumenter ke Indonesia adalah hasil bawaan penjajah Belanda, dan penerbitannya telah mulai dikembangkan sejak tahun 1912. Kemudian Belanda terus mengembangkannya dari tahap awal hingga ke dekade 40-an. Film dokumenter yang wujud pada tahap awal ini lebih banyak digunakan untuk eksplorasi kawasan Hindia Belanda. Tema yang dominan pada masa ini antaranya ialah panorama, yang secara tidak langsung juga menjadi bahan laporan audio visual mengenai keadaan negara jajahan, khususnya mengenai perkebunan, pemerintahan, serta keadaan budaya dan masyarakat di kawasan jajahan kepada negara induk. Namun secara tidak langsung, film dokumenter juga berfungsi sebagai medium propaganda kepada

kaum pribumi untuk pengukuhan kuasa negara penjajah di Hindia Belanda. Bagaimana film dokumenter dijadikan medium propaganda oleh pihak penjajah, sedikit banyak juga telah menjadi satu contoh yang seterusnya digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan pemerintahan di tahap-tahap berikutnya.

Antara tahun 1942 hingga 1945, Jepang menguasai Indonesia. Suasana perang dunia ke-II pada masa itu turut memengaruhi kandungan dan pemanfaatan film dokumenter yang diproduksi oleh pihak Jepang. Pada masa itu film dokumenter sepenuhnya digunakan untuk keperluan perang dan propaganda. Meskipun perusahaan penerbitan film hingga ke aspek kontennya dikuasai secara mutlak oleh Jepang, namun pada masa ini kaum pribumi mulai mendapatkan tempat dan kesempatan untuk terlibat dalam proses penerbitan film dokumenter. Pada masa itu Jepang menggunakan pendekatan “menyerahkan kepada rakyat”, meski demikian proses produksi tetap dalam kawalan penuh penjajah Jepang. Bagaimanapun, kaum pribumi pada masa revolusi itu, dengan cara sembunyi-sembunyi, mampu menjadikan film dokumenter sebagai salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Pada masa penjajahan ini, film dokumenter sangat efektif dalam membangun kesadaran awal akan pentingnya komunikasi massa, sukses dalam mempengaruhi pikiran dan mampu membawa perubahan pada masyarakat.

Pertengahan dekade 40-an atau awal mula Indonesia merdeka, film dokumenter masih lagi dijadikan alat perjuangan oleh pemerintah Orde Lama. Hal ini disebabkan kerana meskipun Indonesia sudah merdeka, tetapi upaya masuknya kembali bangsa Eropa ke Indonesia masih lagi menjadi tantangan utama. Pada masa inilah film dokumenter banyak menyampaikan berita dan peristiwa yang mampu menggelorakan semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Film berita mengenai perang di beberapa kawasan di tanah air dan peristiwa penting kenegaraan yang terjadi di ibukota negara adalah beberapa tema dan kandungan yang utama. Selain itu, film dokumenter juga menjadi alat bagi pemerintah dalam menanamkan doktrin, ideologi dan visi pemerintah kepada rakyat, seperti menanamkan ideologi nasionalisme, anti-komunis dan anti-Amerika.

Baru pada dekade 60-an, atau tepatnya pada masa pemerintah Orde Baru berkuasa, film dokumenter difungsikan sebagai medium penerangan dan pembangunan oleh pemerintah. Beberapa program pemerintah seperti Keluarga Berencana (KB), transmigrasi, kesehatan, hingga pariwisata, senantiasa didukung oleh film-film dokumenter yang berhubungan dengan perkara-perkara tersebut, sehingga pesan-pesan tersebut dapat menjadi lebih berkesan ke masyarakat.

Pembangunan perfilman juga semakin dimantapkan pada tahap ini dengan disusun dan disahkannya Undang-Undang Perfilman, serta pengurusan yang diletakkan di bawah Kementerian Penerangan. Selama 32 tahun Presiden Soeharto berkuasa, film dokumenter selalu berada di bawah kontrol penuh pemerintah. Baik melalui mekanisme sensor, pemilikan, maupun propaganda. Namun, perlu juga digarisbawahi bahwa selain film dokumenter jenis pembangunan dan propaganda, jenis dokumenter antropologi, alam, dan ilmu pengetahuan juga semakin dikembangkan, utamanya sejak dekade 80-an. Eksplorasi budaya nasional menjadi isu yang dominan pada film dokumenter Indonesia di penghujung tahap ketiga ini.

Pada tahap ke-empat, yaitu selepas era reformasi 1998, film dokumenter Indonesia tampak semakin kritis dalam mengupas isu-isu sosial dan politik yang terjadi di Indonesia. Film dokumenter berkembang dengan cepat, seiring dengan semakin terbukanya kebebasan bersuara dan mengeluarkan pendapat masyarakat. Memandang perkembangan film dokumenter Indonesia pada tahap ini, dapat dikatakan bahwa dari segi kuantitas memang berkembang semakin banyak, dan dari segi kualitas pula semakin baik dengan keberbagaian tema. Gaya dan tema baru dalam pembuatan film dokumenter semakin dieksplorasi, khususnya oleh pembuat film dari kaum muda dan independen.

Akan tetapi campur tangan pemerintah dalam tahap ini tampak semakin berkurang. Kajian ini mendapati bahwa penerbitan film dokumenter lebih banyak dikembangkan oleh perseorangan film swasta atau perseorangan independen. Dari segi regulasi pula, Undang-Undang Perfilman No.8 tahun 1992 mulai dipandang oleh banyak kalangan sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan perfilman saat ini. Meskipun baru-

baru ini pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Perfilman tahun 2009 sebagai gantinya, namun beberapa pihak masih memandang bahwa Undang-undang ini belum memenuhi tuntutan dan keperluan para penerbit dan pelaku film. Pada Undang-undang ini memang telah disebutkan;

- a. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin untuk memperkuat ketahanan nasional dan karena itu negara bertanggung jawab memajukan perfilman;
- b. bahwa film sebagai media komunikasi massa merupakan sarana pencerdasan kehidupan bangsa, pengembangan potensi diri, pembinaan akhlak mulia, pemajuan kesejahteraan masyarakat, serta wahana promosi Indonesia di dunia internasional, sehingga film dan perfilman Indonesia perlu dikembangkan dan dilindungi;
- c. bahwa film dalam era globalisasi dapat menjadi alat penetrasi kebudayaan sehingga perlu dijaga dari pengaruh negatif yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan jati diri bangsa Indonesia;

Namun perkara pentingnya ialah, dalam Undang-Undang terbaru ini fungsi film sebagai alat pendukung pembangunan masih belum lagi banyak dibahas. Beberapa penerbit dan sutradara film pula memandang bahwa Undang-Undang ini sesungguhnya lebih banyak membahas aspek film sebagai komoditas perdagangan, sehingga lebih banyak mengatur secara tata niaga. Oleh yang demikian, penyusunan suatu peraturan perfilman yang juga membahas mengenai film dokumenter dan pemanfaatannya bagi pembangunan adalah penting. Penyusunan strategi dan rencana pembangunan industri film dokumenter secara berkala juga dirasa amat perlu dilakukan. Hal ini memungkinkan pembangunan perfilman, khususnya dokumenter mempunyai tujuan yang jelas dan terarah.

Meski demikian, satu pencapaian yang penting dalam perkembangan film dokumenter Indonesia adalah ketika semakin banyaknya penyelenggaraan festival film dokumenter Indonesia. Di samping itu, film dokumenter Indonesia juga sudah mulai berani unjuk gigi dan

memenangkan berbagai festival film dan pasaran internasional.

Dengan melihat perjalanan sejarah film dokumenter Indonesia hingga ke tahap ini, pengkaji menyimpulkan bahwa pembangunan film dokumenter Indonesia telah mengalami satu kemajuan yang positif baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Namun bagaimanapun, film dokumenter Indonesia masih harus berhadapan dengan berbagai tantangan, seperti masalah regulasi dan kontrol, manajemen, pasaran –baik di peringkat lokal maupun internasional, peningkatan kualitas, serta perbaikan sistem pengelolaan perfilman nasional.

### **Perbandingan Perkembangan Film Dokumenter Indonesia dengan Malaysia**

Sebagai sesama negara membangun yang terletak di kawasan Nusantara, dan mempunyai kesamaan latar belakang sejarah sebagai bangsa jajahan negara-negara Eropa, Indonesia dan Malaysia mempunyai beberapa kesamaan dan perbedaan dalam aspek pembangunan film dokumenternya. Artikel ini akan menyoroti aspek ini untuk melihat dan membandingkan peranan dan pembangunan film dokumenter di masing-masing negara, sekaligus membuat tolok ukur bagi melihat pentingnya pemanfaatan film dokumenter sebagai medium pembangunan di negara-negara serantau.

Fakta sejarah menunjukkan bahwa Inggris lebih dahulu mengenal proses perekaman gambar bergerak dibandingkan dengan Belanda. Rekaman gambar bergerak –yang seterusnya dikenali sebagai film- telah hadir London sejak 1890, bahkan sebelum Lumiere mengadakan pertunjukan film yang pertamanya di Perancis tahun 1895. Sedangkan Belanda baru mengenal teknologi film pada tahun 1896, yaitu ketika pertunjukan film Lumiere singgah di Kalverstraat, Belanda.

Dari catatan sejarah juga didapati bahwa kedua bangsa Eropa ini bersama-sama membawa film dokumenter untuk dipertontonkan di negara jajahannya masing-masing. Inggris membawa film dokumenter tentang Jubli Intan Ratu Victoria ke Malaysia pada tahun 1898, manakala Belanda membawa film tentang Sribaginda Maharatu Belanda ke Indonesia pada tahun 1900. Kajian Asiah Sarji et al. (2008) mendukung temuan kajian

ini dan menambahkan bahwa dari segi sejarahnya, pembangunan film dokumenter di Malaysia memang mengikut jejak pembangunan film dokumenter di Inggris, sama halnya dengan film dokumenter di Indonesia yang mengikut perkembangan film dokumenter di Belanda.

Namun satu hal penting yang didapat melalui kajian ini adalah, bahwa dengan masa perkenalan dan pengaruh dari bangsa penjajah yang hampir sama itu (Indonesia dan Malaysia hanya berselisih 2 tahun dalam perkenalan dengan film dokumenter), nyatanya Indonesia lebih dulu menerbitkan film dokumenternya dibandingkan Malaysia. Film dokumenter Indonesia (yang dibuat oleh orang Belanda) pertama kali terbit pada tahun 1912, sedangkan Malaysia baru memproduksi film dokumenternya pada tahun 1920. Beberapa film dokumenter Malaysia yang paling awal diterbitkan antaranya *Malayan Motor Road* (1920), *Memories of Malacca* (1921) dan *Malay Nights* (1931) (Asiah Sarji et al. 2008).

Bukan hanya dalam hal penerbitan film dokumenter, dari aspek pengurusan pula, Indonesia telah lebih dulu mulai dibandingkan dengan Malaysia. Berita Film Nasional di Indonesia didirikan pada tahun 1945, dan telah sepenuhnya lepas dari campur tangan penjajah untuk kemudian dikelola oleh pihak pribumi. Sementara di Malaysia, pendirian Unit Film Negara Malayan baru dilaksanakan pada tahun 1946. Memang hanya berselang setahun lebih lambat berbanding Indonesia, namun dari segi pengurusan, UFN Malaysia masih berada di bawah kuasa penjajah Inggris.

Meski demikian, Malaysia justru lebih dulu mensahkan Dasar Perfilman Negara-nya, yaitu pada tahun 1987, sedangkan Indonesia jauh lebih lambat daripada itu. Undang-Undang Perfilman Republik Indonesia baru disahkan pada tahun 1992. Namun satu lagi kesamaan antara kedua-dua negara ini adalah, baik DPN Malaysia maupun UU Perfilman Indonesia tahun 1992 sama-sama tidak terlalu mementingkan masalah penerbitan dan pembangunan film dokumenter di negaranya masing-masing. Baru pada tahun 2005, masalah film dokumenter di Malaysia disinggung dalam upaya penyusunan strategi Dasar Perfilman Negara yang baru (Asiah Sarji et al. 2008). Sedangkan di Indonesia, upaya yang sama belum diwujudkan hingga tahun 2008.

Dari semua aspek di atas, pada dasarnya pembangunan film dokumenter di Indonesia maupun Malaysia dapat disimpulkan sama-sama masih dalam tahap membangun. Pembangunan film dokumenter di kedua negara ini juga masih harus menghadapi tantangan yang sama, antaranya dalam aspek pemasaran (baik lokal maupun internasional), penyesuaian perundang-undangan dan manajemen sistem perfilman nasional.

## Kesimpulan

Kajian ini merumuskan bahwa hingga tahun 2009, film dokumenter Indonesia masih harus menghadapi berbagai tantangan hebat baik dari dalam maupun luar negara. Seperti masalah krisis keuangan, kestabilan politik, kemiskinan, berbagai musibah dan bencana alam, keamanan nasional, hingga kedudukan Indonesia dalam politik internasional. Semua masalah ini memerlukan pengutamaan dan perhatian yang serius, bagi menjadikan bangsa Indonesia kokoh dan stabil dalam upaya melakukan pembangunan. Sedangkan pembangunan dalam bidang perfilman, dipandang sebagai bukan perkara utama yang mesti dilakukan segera, sehingga bidang ini belum mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Namun ini tidak berarti pemerintah dapat mengabaikan pembangunan dalam bidang penerbitan film dokumenter. Malah dalam konteks ini, film dokumenter dapat digunakan secara sistematis untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Apa yang ditemui dalam kajian ini adalah sesuatu yang tidak wajar berlaku, sedangkan film dokumenter mempunyai sifat yang sangat fleksibel untuk digunakan sebagai pendukung pembangunan negara.

Bagi membantu pihak pemerintah dalam merumuskan rencana pembangunan yang mantap dalam bidang perfilman khususnya dokumenter tersebut, pengalaman dan pengamalan yang dilalui sejak zaman penjajahan, masa Orde Lama dan masa Orde Baru perlu diambil sebagai panduan. Pada masa penjajahan, film dokumenter dijadikan medium penting bagi mempromosikan kebudayaan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, film dokumenter menjadi alat pendukung utama revolusi dan penggeloraan semangat nasionalisme. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru juga, film dokumenter menjadi alat pendukung pembangunan dan pengukuh kuasa pemerintah. Oleh

karena itu, tradisi tersebut harus diteruskan, apalagi Indonesia tengah menghadapi tantangan pembangunan negara yang lebih besar, yang bukan saja datang dari dalam tetapi juga dari luar negara. Malah film dokumenter dapat membantu mempercepat proses pembangunan sosio-ekonomi bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembangunan film dokumenter sepatutnya diberi perhatian yang cukup oleh pemerintah, sehingga dapat memberi sumbangan penting bagi pembangunan nasional Indonesia.

### Daftar Pustaka

Asiah Sarji, Faridah Ibrahim & Shamshubaridah Ramlee, "Industri dokumenter di Malaysia; kajian sistem, pasaran, fungsi dan kegunaan", Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi, 2008.

Fang, I, "*A History of mass communication: Six information revolutions*", Focal Press, Boston, 1997

Kessler, F, "Actualités", Dlm. Richard Abel (pnyt.). *Encyclopedia of early cinema*. USA: Routledge, USA, 2005.

McQuail, D, "*Mass communication theory: an introduction*", Sage Publication, London, 1983.

Mohd. Hamdan Adnan, Zulkarimein Nasution, "Komunikasi pembangunan: pengenalan dan penerapan", Kementrian Pendidikan Malaysia, Kuala Lumpur, 1992.

Pratzner, W.F, "*What has happened to the documentary film? The Public opinion quarterly*", Vol.11 No.3, 394-401. Oxford University Press, Oxford, 1947.

Rotha, P, "*Documentary film; The use of the film medium to interpret creatively and in social terms the life of the people as it exist in reality*", Faber and Faber, Ltd, London, 1951.

Schramm, W, "*Mass media and national development: the role of information in the developing countries*", Stanford University Press, California, 1964.